



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 April 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SETYO WAHONO**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **967798**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 10.757.896.400**

1. Tanah Seluas 1757 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 323.288.000
2. Tanah Seluas 2012 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 83.296.800
3. Tanah Seluas 1760 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 28.448.700
4. Tanah Seluas 2266 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 93.812.400
5. Tanah Seluas 2091 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 33.665.100
6. Tanah Seluas 1724 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 71.373.600
7. Tanah Seluas 929 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 213.670.000
8. Tanah Seluas 1.845 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 101.844.000
9. Tanah Seluas 1845 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 101.844.000
10. Tanah Seluas 3.001 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 93.181.050
11. Tanah Seluas 1.76 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL



SENDIRI Rp. 54.648.000

12. Tanah Seluas 1.76 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL
SENDIRI Rp. 54.648.000

13. Tanah Seluas 4.001 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL
SENDIRI Rp. 124.231.050

14. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL
SENDIRI Rp. 40.250.000

15. Tanah Seluas 1.78 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 949.808.000

16. Tanah Seluas 3.129 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 370.630.050

17. Tanah Seluas 2.327 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 1.241.687.200

18. Tanah Seluas 2.409 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 285.346.050

19. Tanah Seluas 2.001 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 1.267.733.600

20. Tanah Seluas 829 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 105.195.050

21. Tanah Seluas 741 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 92.771.450

22. Tanah Seluas 888 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 125.183.600

23. Tanah Seluas 1.336 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 60.332.800

24. Tanah Seluas 2.224 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 70.055.200

25. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m2/249 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.954.978.550

26. Tanah Seluas 188 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 1.716.125.000

27. Tanah Seluas 943 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL
SENDIRI Rp. 44.280.150

28. Tanah Seluas 835 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL
SENDIRI Rp. 55.569.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

1.610.000.000

1. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER 200 STD A/T Tahun 2014,



HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

2. MOBIL, TOYOTA HARRIER 2.OL 2WD RHD A/T Tahun 2015,

HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

3. MOTOR, PIAGGIO VESPA SPRINT IGET 150 ABS A/T Tahun

2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.076.060.484

F. HARTA LAINNYA

Rp. 6.975.000.000

Sub Total

Rp. 24.418.956.884

III. HUTANG

Rp. 711.789.194

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 23.707.167.690

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.